



LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* 2025

Disusun Oleh:
Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Padang



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang-Pariaman, 30 April 2026
Plt. Kepala,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti, S.Pi
NIP. 19770606 200502 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	67



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG**

JALAN RAYA BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, PADANG PARIAMAN 25586

TELEPON (0751) 819109, 819090, FAKSIMILE (0751) 819109

LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK sppmhkp.padang@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan **Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang-Pariaman, 30 April 2026
Plt. Kepala,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti, S.Pi
NIP. 19770606 200502 2 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode berakhir 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.990.000,00** atau mencapai **5,86 persen** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp51.000.000,00**.

Realisasi Belanja Negara untuk periode berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp3.577.269.650,00** atau mencapai **89,71 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp3.987.798.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per **31 Desember 2025**. Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Per **31 Desember 2025** dicatat dan disajikan sebesar **Rp6.931.462.947,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp98.523.055,00**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp6.832.939.892,00**.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar **Rp10.057.626,00** yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah



sebesar **Rp6.931.462.947,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp2.990.000,00**. Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp3.923.284.427,00**, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp3.929.294.427,00**. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp2.040.694,00** Entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(3.931.335.121,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2025** adalah sebesar **Rp7.257.319.180,00** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(3.931.335.121,00)** kemudian ditambah transaksi antar entitas sebesar **Rp3.595.421.262,00** kenaikan/penurunan ekuitas **Rp(335.913.859,00)** sehingga ekuitas akhir pada Tanggal **31 Desember 2025** adalah senilai **Rp6.921.405.321,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar



Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Padang-Pariaman, 30 April 2026
Plt. Kepala,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti, S. Si
NIP. 19770606 200502 2 001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PPMHKP PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Anggaran	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	51.000.000	2.290.000	4,49	11.089.516
Jumlah Pendapatan		51.000.000	2.290.000	4,49	11.089.516
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.112.531.000	2.065.578.486	97,78	2.269.403.732
Belanja Barang	B.4	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61	1.830.988.266
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		3.987.798.000	3.577.269.650	89,71	4.100.391.998

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PPMHKP PADANG NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2024	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	529.066	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(2.646)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.10	97.996.635	102.236.495
Jumlah Aset Lancar		98.523.055	102.236.495
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.976.345.000	1.976.345.000
Peralatan dan Mesin	C.15	5.411.513.177	5.411.513.177
Gedung dan Bangunan	C.16	5.404.011.200	5.404.011.200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	223.660.000	223.660.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6.182.589.485)	(5.847.964.346)
Jumlah Aset Tetap		6.832.939.892	7.167.565.031
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		6.931.462.947	7.269.801.526
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	10.057.626	12.482.346
Uang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.057.626	12.482.346
JUMLAH KEWAJIBAN		10.057.626	12.482.346
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	6.921.405.321	7.257.319.180
JUMLAH EKUITAS		6.921.405.321	7.257.319.180
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.931.462.947	7.269.801.526

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PPMHKP PADANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.990.000	9.385.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.990.000	9.385.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.065.049.420	2.269.403.732
Beban Persediaan	D.3	116.448.106	256.364.318
Beban Barang dan Jasa	D.4	839.564.945	873.737.673
Beban Pemeliharaan	D.5	532.030.966	506.756.556
Beban Perjalanan Dinas	D.6	44.563.705	369.039.856
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	334.625.139	477.839.491
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	2.646	-
JUMLAH BEBAN		3.932.284.927	4.753.141.626
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.929.294.927)	(4.743.756.626)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	685.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	1.469.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	784.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya		(2.040.694)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.040.694	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Oprasional		(2.040.694)	685.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.931.335.621)	(4.743.071.626)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.931.335.621)	(4.743.071.626)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PPMHKP PADANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	7.257.319.180	9.305.932.229
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.931.335.121)	(4.743.071.626)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	1.177
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		3.595.421.262	2.694.457.400
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(335.913.859)	(2.048.613.049)
EKUITAS AKHIR	E.5	6.921.405.321	7.257.319.180

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Raya Bandara Internasional Minangkabau, Padang-Pariaman, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu ke hilir. Melalui peran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia. Upaya



memastikan produk kelautan dan perikanan memiliki daya saing yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional. Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:



Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran



produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;

5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PPMHKP Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PPMHKP Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun



PPMHKP Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PPMHKP Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP



Padang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan



penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama



Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh



tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun PPMHKP Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pada tahun 2025 juga terdapat revisi blokir anggaran sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1023/WPB.03/2024 tanggal 07 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH BLOKIR
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	51.000.000	51.000.000
Pendapatan lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	51.000.000	51.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.285.882.000	2.112.531.000
Belanja Barang	2.067.867.000	1.875.267.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	4.353.749.000	3.987.798.000

Pada tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang melakukan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi 1 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi



Pencantuman catatan halaman IV DIPA. Tanggal revisi 21 Februari 2025

2. Revisi 2 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi penghematan anggaran. Tanggal revisi 16 April 2025
3. Revisi 3 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal 26 Mei 2025
4. Revisi 4 merupakan revisi kewenangan KANWIL DJPB: revisi perubahan rencana penarikan halaman III DIPA. Tanggal Revisi 10 Juli 2025
5. Revisi 5 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 09 September 2025
6. Revisi 6 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi pemotongan anggaran. Tanggal revisi 08 Oktober 2025
7. Revisi 7 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 22 Oktober 2025.
8. Revisi 8 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi perubahan halaman IV DIPA. Tanggal revisi 18 November 2025. Tanggal revisi 18 November 2025.
9. Revisi 9 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 27 November 2025.
10. Revisi 10 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 12 Desember 2025.

Realisasi

Pendapatan

Rp2.990.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.990.000,00 atau mencapai 5,86 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp51.000.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan Stasiun PPMHKP Padang merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:



Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBП Tahun 2025

Jenis Pendapatan	2025		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	51.000.000	2.990.000	5,86
Pendapatan Denda	-	-	-
Penerimaan Kembali TAYL	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	51.000.000	2.990.000	5,86

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp8.099.516,00 atau 270,89 persen. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 terdapat kenaikan target PNBП Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Karantina Indonesia. Perbandingan realisasi PNBП Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBП Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS PNBП	REALISASI PNBП (Rp)		NAIK (TURUN)	
	2025	2024	Jumlah	%
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.469.000	(1.469.000)	-
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL	-	235.516	(235.516)	-
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	2.990.000	9.385.000	(6.395.000)	-213,88
Pendapatan Denda	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	-	100,00
Jumlah	2.990.000	11.089.516	(8.099.516)	-270,89



*Realisasi**Belanja Negara**Rp3.577.269.65**0,00***B.2 Belanja Negara**

Realisasi Belanja SPPMHKP Padang selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.577.269.650,00 atau 89,71 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.987.798.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.112.531.000	2.065.578.486	97,78
Belanja Barang	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.987.798.000	3.577.269.650	89,71

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp523.122.348,00 atau 12,76 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pagu tahun anggaran 2025 terdapat efisiensi anggaran.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	REALISASI NETTO (Rp)		NAIK/ TURUN	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.065.578.486	2.269.403.732	(203.825.246)	(8,98)
Belanja Barang	1.511.691.164	1.830.988.266	(319.297.102)	(17,44)
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	3.577.269.650	4.100.391.998	(523.122.348)	(12,76)



*Belanja
Pegawai
Rp2.065.578.48
6,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.065.578.486,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai Tahun 2025 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	940.289.000	917.832.555	97,61
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	139.803.000	122.354.572	
Belanja Lembur	36.000.000	34.328.000	95,36
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	996.439.000	991.063.445	99,46
Jumlah Belanja	2.112.531.000	2.065.578.572	97,78
Pengembalian Belanja Pegawai	-	86	
Jumlah Belanja	2.112.531.000	2.065.578.486	97,78

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, terdapat penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp203.825.246,00 atau 82,81 persen karena adanya penurunan kelas jabatan pegawai dan efisiensi belanja pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan tabel 6 berikut ini:



Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 dan TA. 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		NAIK (TURUN)	
	2025	2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	917.832.469	1.087.601.090	(169.768.621)	(15,61)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	122.354.572	46.146.810	76.207.762	165,14
Belanja Lembur	34.328.000	88.941.000	(54.613.000)	(61,40)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	991.063.445	1.046.714.832	(55.651.387)	(5,32)
Jumlah Belanja	2.065.578.486	2.269.403.732	(203.825.246)	82,81

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp1.511.691.164,00

Realisasi Belanja Barang selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.511.691.164,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2025 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	477.803.000	436.101.931	91,27
Belanja Barang Non Operasional	84.316.000	63.247.010	75,01
Belanja Barang Persediaan	140.670.000	102.342.892	72,75
Belanja Jasa	363.491.000	342.640.224	94,26
Belanja Pemeliharaan	605.229.000	522.795.402	86,38
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	203.758.000	44.563.705	21,87
Jumlah Belanja	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp319.297.102,00 atau 17,44 persen karena efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan



pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	2025	2024	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	436.101.931	439.078.890	-2.976.959	(0,68)
Belanja Barang Non Operasional	63.247.010	78.522.460	-15.275.450	(19,45)
Belanja Barang Persediaan	102.342.892	96.121.648	6.221.244	6,47
Belanja Jasa	342.640.224	360.494.727	-17.854.503	(4,95)
Belanja Pemeliharaan	522.795.402	487.730.685	35.064.717	7,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44.563.705	369.039.856	-324.476.151	(87,92)
Jumlah Belanja	1.511.691.164	1.830.988.266	-319.297.102	-17,44

Belanja Modal
Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal Gedung dan bangunan.



B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Aset Lancar
Rp98.523.0
55,00*

C.1 Aset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp98.523.055,00 dan Rp102.236.495,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel 13 berikut ini:



Tabel 13
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Piutang bukan pajak	529.066	-
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.646)	-
4	Persediaan	97.996.635	102.236.495
5	Persediaan yang belum diregister	-	-
Jumlah		98.523.055	102.236.495

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh PNBPN langsung disetorkan ke kas negara, jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

*Kas
Lainnya
dan Setara
Kas Rp0,00*

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara



pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
PNBP
Rp0,00*

C.1.4 Piutang PNB

Saldo Piutan PNB per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp529.066,00 dan Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB pada Stasiun PPMHKP Padang merupakan atas potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2025 yang nantinya akan dipotong melalui tunjangan kinerja bulan Januari 2026 yang akan dibayarkan pada Februari 2026.

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00*

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2025. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp0,00*

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo bagian lancar TPA pada tahun 2025. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan



Piutang Tak **Pajak**

Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp2.646,00 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.646,00 dan Rp(0,00) Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan penyisihan piutang atas pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2025 yang dibayarkan dibulan Februari 2025.

Belanja Dibayar di Muka Rp0.00 **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo belanja dibayar dimuka pada tahun 2025. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00 **C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tahun 2025. Ini merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp97.996.635,00 **C.1.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp102.236.495,00 dan Rp102.236.495,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



*Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember
2024*

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	68.477.785	41.435.293
Barang untuk Pemeliharaan	1.883.000	1.511.300
Suku Cadang	-	2.565.164
Bahan Baku	27.635.850	56.724.738
Jumlah	97.996.635	102.236.495

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0.00*

C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00*

C.1.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang



ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Tetap
Rp6.832.93
9.892,00

C.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp6.6.832.939.892,00 dan Rp7.167.565.031,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.

Tanah
Rp1.985.29
0.880,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PPMHKP Padang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp.1.976.345.000,00 dan Rp Rp1.985.290.880,00.

Rincian Tanah Tahun Tahun 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1515 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	1.684.407.000
2	200 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	224.568.000
3	60 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	67.370.000
Jumlah			1.976.345.000



Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	1.976.345.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.976.345.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.976.345.000

*Peralatan
dan Mesin
Rp5.411.513.177,00*

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp5.411.513.177,00 dan Rp5.411.513.177,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	5.411.513.177
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.411.513.177
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5.209.771.798)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	201.741.379

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tahun 2025.

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.404.011.200,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2022 adalah masing - masing senilai



Rp5.404.011.200,00 dan Rp5.404.011.200,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	5.404.011.200
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Perolehan melalui KDP	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.404.011.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(874.807.687)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.529.203.513

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp223.660.000,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp223.660.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	223.660.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	223.660.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(98.010.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	125.650.000

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp0,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025.



Konstruksi **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Dalam

Pengerjaan

Rp0,00

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2025.

Akumulasi **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan

Aset Tetap

Rp(5.118.95

1.147,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(6.035.590.045,00) dan Rp(5.847.964.346,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.411.513.177	(5.209.771.798)	201.741.379
2	Gedung dan Bangunan	5.404.011.200	(874.807.687)	4.529.203.513
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.660.000	(98.010.000)	125.650.000
4	Aset Tetap yang tidak digunakan	0	-	-
Akumulasi Penyusutan		11.039.184.377	(6.182.589.485)	4.856.594.892

Aset Tak

Berwujud

Rp0,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.



*Aset Lain-
Lain Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Aset Lain – lain pada tahun 2025. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada tahun 2025. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.058.126,00 dan Rp12.482.346,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan



Rp12.482.346,00 kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang pada pihak ketiga ini adalah berupa akrual listrik, telepon, air, dan internet bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Listrik	7.008.665
2	Telepon	36.186
3	Telepon	53.675
4	PDAM	450.500
5	Internet	2.508.600
Total		10.057.626

Pendapatan Diterima di Muka C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Ekuitas C.27 Ekuitas

Rp7.257.319.180,00 Ekuitas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.257.319.180,00 dan Rp9.305.932.229,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus
(Defisit) dari
Kegiatan
Operasional
Rp3.782.295.
487,00*

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp3.782,295.487,00 dan Rp4.743.756.626,00. Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp2.990.000,00 dikurangi beban Rp(3.785.285.487,00).

*Pendapatan
PNBP
Rp2.990.000,
00*

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.990.000,00 dan Rp9.385.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	2.990.000	9.385.000	(68,14)
Jumlah	2.990.000	9.385.000	-68,14

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi, pendapatan jasa karantina ikan.

*Beban
Pegawai
Rp2.065.049.4
20,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.065.049.420,00 dan Rp2.269.403.732,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturassn perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,



Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji tunjangan PNS	2.126.101.098	2.047.240.980	3,85
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.860.144.193	1.746.788.492	6,49
Beban Lembur	272.787.000	245.445.000	11,14
Jumlah	4.259.032.291	4.039.474.472	5,44

Pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO		
Belanja Pegawai (LRA)	:	2.065.578.486
Belanja Pegawai (LO)	:	2.065.049.420
Selisih	:	529.066
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari pengembalian tunjangan kinerja desember 2025 1. Pengembalian 2 PNS = 264.740 2. Pengembalian 1 PPPK = 264.326		

Beban

Persediaan

Rp116.448.106,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp116.448.106,00 dan Rp256.364.318,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.



*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31
Desember 2024*

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	57.234.921	102.848.558	-44,35
Beban Persediaan Bahan Baku	59.213.185	153.515.760	-61,43
Jumlah	116.448.106	256.364.318	-54,58

Penjelasan Selisih antara LO dan LRA		
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:	116.448.106
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:	102.342.892
PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2025	:	102.236.495
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2025	:	97.996.635
Selisih	:	9.865.354
PENJELASAN : Selisih terdiri dari:		
1. Transfer masuk : 21.141.612		
2. Persediaan usang : (2.040.694)		
3. Beban persediaan untuk pemeliharaan : (6.670.400)		
4. Beban suku cadang : (2.565.164)		

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp839.564.94
5,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp839.564.945,00 dan Rp873.737.373,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	88.626.425	130.113.927	(31,89)
Beban Langganan Telepon	1.069.709	3.084.546	(65,32)
Beban Langganan Air	6.646.500	11.842.500	(43,88)
Beban Sewa	5.000.000	0	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	950.000	6.458.050	(85,29)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	2.000.000	0	100,00
Beban Jasa lainnya	235.923.370	204.637.000	15,29
Beban Bahan	23.147.010	60.942.460	(62,02)
Beban Honor Output Kegiatan	0	4.080.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	40.100.000	13.500.000	197,04
Beban Keperluan Perkantoran	251.869.000	344.157.890	(26,82)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	13.597.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	609.950	374.000	63,09
Beban Honor Operasional Satker	72.540.000	51.914.000	39,73
Beban Barang Operasional Lainnya	111.082.981	29.036.000	282,57
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid	0	0	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Jumlah	839.564.945	873.737.373	(3,91)

Beban

Pemeliharaan

Rp532.030.96

6,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp532.030.966,00 dan Rp506.756.556,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan



karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	317.346.000	263.574.500	20,40
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.449.402	224.156.185	-8,35
Beban persediaan untuk pemeliharaan	6.670.400	10.395.800	(35,84)
Beban persediaan suku cadang	2.565.164	8.630.071	-70,28
Jumlah	532.030.966	506.756.556	4,99

Pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional terdapat selisih. Pengungkapan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Belanja Pemeliharaan antara LRA dan LO		
Belanja Pemeliharaan (LRA)	:	522.795.402
Belanja Pemeliharaan (LO)	:	532.030.966
Selisih	:	-9.235.564
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp6.670.400,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp2.565.164,00		

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp44.563.705
,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp44.563.705,00 dan Rp369.039.856,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh efisiensi dan blokir



anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	34.161.505	205.375.200	(83,37)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	26.360.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.402.200	137.304.656	(92,42)
Jumlah	44.563.705	369.039.856	(87,92)

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada tahun 2025.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp334.625.13*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp334.625.139,00 dan Rp477.839.491,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat lokasi



9,00

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.267.560	349.762.918
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.485.579	122.204.573
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5.872.000	5.872.000
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-
Jumlah Penyusutan	334.625.139	477.839.491
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.625.139	477.839.491

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.646,00 dan Rp1.177,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.646	0	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	2.646	0	100,00

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00*

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	1.469.000	100,00
Beban Pelepasan aset non lancar	0	784.000	100,00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lancar	0	685.000	100,00
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	2.040.694	0	0,00
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(2.040.694)	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.040.694)	685.000	(397,9)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar
Biasa Rp0,00*

D.13 Pos Luar Biasa

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Pos luar biasa pada tahun 2025. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat



diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp7.257.319.180,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.257.319.180,00 Rp9.305.932.229,00.

Defisit LO

Rp(3.931.335.121,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(3.931.335.121,00) dan Rp(4.743.071.626,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

***Nilai Aset
Rp0***

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas

***Reklasifikasi
Rp0.00***

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2025 Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.



Selisih**Revaluasi****Aset Tetap****Rp0,00****E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset**Tetap Non****Revaluasi****Rp0,00****E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-**Lain Rp0,00****E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.177,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi**Antar Entitas****Rp3.595.421.****262,00****E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.595.421.262,00 dan Rp2.694.457.400,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.



Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.990.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.577.269.650
Transfer Masuk	21.141.612
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.595.421.262

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(2.990.000,00) ini merupakan jumlah pendapatan selama tahun 2025. sedangkan DKEL sebesar Rp3.577.269.650,00 yang merupakan jumlah realisasi SP2D selama tahun 2025.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pada tahun 2025 terdapat transaksi Transfer Masuk berupa persediaan dari Sekretariat BPPMHKP (sertifikat) dan BUSPM (Bahan Laboratorium) Rp21.141.612,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang



maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp6.921.405.

321,00

Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.921.405.321,00 dan Rp7.257.319.180,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Informasi Rekening Satker

No	No Rekening	Nama Rekening	Tahun 2025
1	9890455674321000	BPg 010 SKIPM PADANG	0

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Padang Nomor KEP 34/PA/2025 tanggal 22 Oktober 2025:

No	Nama	Jabatan
1	Ira Susanti, S.Si	Kuasa Pengguna Anggaran

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan



tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Padang 04/KPA/SPPMHKP.PDG/KU.110/I/2025 tanggal 13 Januari 2025:

No	Nama	Jabatan
1	Rini Sardi, S. Pi	PPK
2	Ivonila Etris, SE	PPSPM

- Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun PPMHKP Padang terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:



Kementerian/ Lembaga		: Kementerian Kelautan dan Perikanan								
Unit Organisasi		: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
Satuan Kerja		: Stasiun PPMHKP Padang								
Fungsi		: 04 (Ekonomi)								
Sub Fungsi		: 04.03 (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan								
Program		: 032.13.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
Lokasi		: (0800) Sumatera Barat								

No.	Kode	Kegiatan	Belanja			Output				
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Keterangan
1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
		PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)								
		002 Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (produk)	45.000.000	12.000.000	26,67	3	3	Produk	100	Efisiensi Anggaran
		PDF Sertifikasi Lembaga (Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat)								
		002 Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (Lembaga)	85.000.000	15.561.505	18,31	12	12	Lembaga	100	Efisiensi Anggaran
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)								
		001 Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Produk)	25.000.000	4.499.900	18,00	1	1	Produk	100	Efisiensi Anggaran
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)								
		002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaga)	10.000.000	0	0,00	7	7	Lembaga	100	Blokir
		7010 Manajemen Mutu								
		PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)								
		001 Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	100.940.000	92.766.412	91,90	1	1	(Rekomendasi Kebijakan	100	
		PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)								
		001 Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (Lembaga)	25.000.000	24.781.700	99,13	1	1	(Lembaga)	100	
		002 Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (Lembaga)	30.000.000	17.811.790	59,37	1	0	(Lembaga)	100	
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)								
		001 Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (Produk)	8.500.000	0	0,00	1	0	(Produk)	0	Blokir
	Total	329.440.000	167.421.307							

- Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pelaksanaannya di antaranya melalui 8 program prioritas satuan kerja dengan pagu mencapai Rp329.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp167.421.307,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga	: Kementerian Kelautan dan Perikanan						
Unit Organisasi	: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
Satuan Kerja	: Stasiun PPMHKP Padang						
Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)							
002 Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (produk)	45.000.000	12.000.000	26,67	3	3	Produk	100
PDF Sertifikasi Lembaga (Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat)							
002 Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (Lembaga)	85.000.000	15.561.505	18,31	12	12	Lembaga	100
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)							
001 Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Produk)	25.000.000	4.499.900	18,00	1	1	Produk	100
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)							
002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaga)	10.000.000	0	0,00	7	7	Lembaga	100
7010 Manajemen Mutu							
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)							
001 Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	100.940.000	92.766.412	91,90	1	1	(Rekomendasi Kebijakan)	100
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)							
001 Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (Lembaga)	25.000.000	24.781.700	99,13	1	1	(Lembaga)	100
002 Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium (Lembaga)	19.000.000	17.811.790	93,75	1	1	(Lembaga)	100
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)							
001 Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (Produk)	8.500.000	0	0,00	1	1	(Produk)	100

Padang Pariaman, 30 April 2026
Plt. Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti, S. Si
NIP. 19770606 200502 2 001



Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Stasiun PPMHKP Padang
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

No	Uraian	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Tanah				
1	Tanah	1.775	1.976.345.000	-	1.976.345.000
	Jumlah	1.775	1.976.345.000	-	1.976.345.000
B	Peralatan dan Mesin				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	995.516.000	935.258.858	60.257.142
2	Alat Ukur	1	14.975.000	14.975.000	-
3	Alat Pengolahan	6	50.473.000	50.473.000	-
4	Alat Kantor	82	418.267.900	408.310.300	9.957.600
5	Alat Rumah Tangga	200	855.366.515	836.949.515	18.417.000
6	Alat Studio	28	215.377.450	208.416.250	6.961.200
7	Alat Komunikasi	1	4.370.000	4.370.000	-
8	Peralatan Pemancar	4	212.153.770	211.842.393	311.377
9	Alat Kedokteran	2	1.850.000	1.850.000	-
10	Unit Alat Laboratorium	56	2.001.143.792	1.970.208.604	30.935.188
11	Unit Alat Laboratorium kimia nuklir	-	-	-	-
12	Alat Laboratorium fisika nuklir	1	86.240.000	86.240.000	-
13	Komputer Unit	30	403.249.280	332.809.908	70.439.372
14	Peralatan Komputer	28	145.530.470	142.380.470	3.150.000
15	Alat Kerja Penerbangan	-	-	-	-
16	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	7.000.000	5.687.500	1.312.500
	Jumlah	451	5.411.513.177	5.209.771.798	201.741.379
C	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	5.314.511.200	856.907.687	4.457.603.513
2	Tugu/ Tanda batas	1	89.500.000	17.900.000	71.600.000
	Jumlah	4	5.404.011.200	874.807.687	4.529.203.513
D	Jaringan				
1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1	33.660.000	19.635.000	14.025.000
2	Jaringan Listrik	1	190.000.000	78.375.000	111.625.000
	Jumlah	2	223.660.000	98.010.000	125.650.000
	Total	2.232	13.015.529.377	6.182.589.485	6.832.939.892



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:00 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	529,066	0	529,066	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,646)	0	(2,646)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	526,420	0	526,420	0.00
Persediaan	97,996,635	102,236,495	(4,239,860)	(4.15)
JUMLAH ASET LANCAR	98,523,055	102,236,495	(3,713,440)	(3.63)
ASET TETAP				
Tanah	1,976,345,000	1,976,345,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,411,513,177	5,411,513,177	0	0.00
Gedung dan Bangunan	5,404,011,200	5,404,011,200	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	223,660,000	223,660,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,182,589,485)	(5,847,964,346)	(334,625,139)	5.72
JUMLAH ASET TETAP	6,832,939,892	7,167,565,031	(334,625,139)	(4.67)
JUMLAH ASET	6,931,462,947	7,269,801,526	(338,338,579)	(4.65)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,057,626	12,482,346	(2,424,720)	(19.43)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,057,626	12,482,346	(2,424,720)	(19.43)
JUMLAH KEWAJIBAN	10,057,626	12,482,346	(2,424,720)	(19.43)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,921,405,321	7,257,319,180	(335,913,859)	(4.63)
JUMLAH EKUITAS	6,921,405,321	7,257,319,180	(335,913,859)	(4.63)
JUMLAH EKUITAS	6,921,405,321	7,257,319,180	(335,913,859)	(4.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,931,462,947	7,269,801,526	(338,338,579)	(4.65)

Keterangan :

FINAL

PADANG PARIAMAN, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

IRA SUSANTI

NIP 197706062005022001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG 567432

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	51,000,000	2,990,000	(48,010,000)	6	12,000,000	11,089,516	910,484	92
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	51,000,000	2,990,000	(48,010,000)	6	12,000,000	11,089,516	910,484	92
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	51,000,000	2,990,000	(48,010,000)	6	12,000,000	11,089,516	910,484	92
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,987,798,000	3,577,269,650	(410,528,350)	90	4,353,749,000	4,100,391,998	253,357,002	94
1. Belanja Pegawai	2,112,531,000	2,065,578,486	(46,952,514)	98	2,285,882,000	2,269,403,732	16,478,268	99
2. Belanja Barang	1,875,267,000	1,511,691,164	(363,575,836)	81	2,067,867,000	1,830,988,266	236,878,734	89
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG 567432

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,987,798,000	3,577,269,650	(410,528,350)	90	4,353,749,000	4,100,391,998	253,357,002	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PADANG PARIAMAN, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

IRA SUSANTI

NIP 197706062005022001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,577,269,650
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,990,000	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,990,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	660,487,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,119	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50,104,480	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,016,734	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,120,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	26,460,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,715,622	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37,296,300	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	99,328,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,295,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	82,890,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,408	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,327,940	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,387,424	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,360,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,793,600	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	18,864,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,730,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	34,328,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	888,482,455	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	102,580,990	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	251,869,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	609,950	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72,540,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	111,082,981	0
3.0	521211	Belanja Bahan	23,147,010	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,100,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,978,650	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	56,364,242	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	90,721,945	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,093,509	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,951,400	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	950,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	235,923,370	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	317,346,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205,449,402	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,161,505	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,402,200	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	86
JUMLAH			3,580,259,736	3,580,259,736

Keterangan :

FINAL

PADANG PARIAMAN, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

IRA SUSANTI

197706062005022001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	529,066	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	2,646
0.0	117111	Barang Konsumsi	68,477,785	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,883,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	27,635,850	0
0.0	131111	Tanah	1,976,345,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,411,513,177	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,404,011,200	0
0.0	134113	Jaringan	223,660,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,209,771,798
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	874,807,687
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	98,010,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,057,626
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,577,269,650
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,990,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	21,141,612
0.0	391111	Ekuitas	0	7,257,319,180
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,990,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	660,487,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,033	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50,104,480	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,016,734	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	6,120,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	26,460,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,715,622	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	37,296,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	99,328,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	18,295,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	82,890,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,408	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,327,940	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,387,424	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,360,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,793,600	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	18,864,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,730,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	34,328,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	888,217,715	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	102,316,664	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	251,869,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	609,950	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72,540,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	111,082,981	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,147,010	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	40,100,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	88,626,425	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,069,709	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,646,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	950,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	235,923,370	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	317,346,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205,449,402	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34,161,505	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,402,200	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222,267,560	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106,485,579	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,872,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	57,234,921	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,670,400	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	2,565,164	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	59,213,185	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	2,646	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	2,040,694	0
JUMLAH			17,051,370,199	17,051,370,199

Keterangan :

FINAL

PADANG PARIAMAN, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ditandatangani
Secara Elektronik

IRA SUSANTI

NIP 197706062005022001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,257,319,180	9,305,932,229	(2,048,613,049)	(22.01)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,931,335,121)	(4,743,071,626)	811,736,505	(17.11)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	1,177	(1,177)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	1,177	(1,177)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,595,421,262	2,694,457,400	900,963,862	33.44
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(335,913,859)	(2,048,613,049)	1,712,699,190	(83.6)
EKUITAS AKHIR	6,921,405,321	7,257,319,180	(335,913,859)	(4.63)

Keterangan :

FINAL

PADANG PARIAMAN, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

IRA SUSANTI

NIP 197706062005022001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,990,000	9,385,000	(6,395,000)	(68.141)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,990,000	9,385,000	(6,395,000)	(68.141)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,990,000	9,385,000	(6,395,000)	(68.141)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,065,049,420	2,269,403,732	(204,354,312)	(9.005)
Beban Persediaan	116,448,106	256,364,318	(139,916,212)	(54.577)
Beban Barang dan Jasa	839,564,445	873,737,673	(34,173,228)	(3.911)
Beban Pemeliharaan	532,030,966	506,756,556	25,274,410	4.987
Beban Perjalanan Dinas	44,563,705	369,039,856	(324,476,151)	(87.924)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (567432) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 26/06/26 4:02 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	334,625,139	477,839,491	(143,214,352)	(29.971)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,646	0	2,646	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,932,284,427	4,753,141,626	(820,857,199)	(17.27)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,929,294,427)	(4,743,756,626)	814,462,199	(17.169)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	685,000	(685,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	1,469,000	(1,469,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	784,000	(784,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2,040,694)	0	(2,040,694)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,040,694	0	2,040,694	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2,040,694)	685,000	(2,725,694)	(397.912)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,931,335,121)	(4,743,071,626)	811,736,505	(17.114)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,931,335,121)	(4,743,071,626)	811,736,505	(17.114)

Keterangan :

FINAL

PADANG PARIAMAN, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

IRA SUSANTI

NIP 197706062005022001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan,							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	815,000,000	661,000,000	660,487,300	0	660,487,300	99.92	512,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	17,000	9,119	86	9,033	53.14	7,967
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	73,925,000	56,092,000	50,104,480	0	50,104,480	89.33	5,987,520
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,600,000	18,600,000	16,016,734	0	16,016,734	86.11	2,583,266
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11,340,000	6,733,000	6,120,000	0	6,120,000	90.9	613,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	84,250,000	27,390,000	26,460,000	0	26,460,000	96.6	930,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,482,000	4,717,000	3,715,622	0	3,715,622	78.77	1,001,378
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,500,000	40,000,000	37,296,300	0	37,296,300	93.24	2,703,700
511129	Belanja Uang Makan PNS	130,000,000	107,000,000	99,328,000	0	99,328,000	92.83	7,672,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,740,000	18,740,000	18,295,000	0	18,295,000	97.63	445,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,215,854,000	940,289,000	917,832,555	86	917,832,469	97.61	22,456,531
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	34,350,000	95,000,000	82,890,200	0	82,890,200	87.25	12,109,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	3,000	1,408	0	1,408	46.93	1,592
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,716,000	7,800,000	7,327,940	0	7,327,940	93.95	472,060
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,000,000	3,300,000	1,387,424	0	1,387,424	42.04	1,912,576
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,900,000	4,100,000	3,360,000	0	3,360,000	81.95	740,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,310,000	6,200,000	5,793,600	0	5,793,600	93.45	406,400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,000,000	20,400,000	18,864,000	0	18,864,000	92.47	1,536,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	3,000,000	2,730,000	0	2,730,000	91	270,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	50,277,000	139,803,000	122,354,572	0	122,354,572	87.52	17,448,428
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	130,000,000	36,000,000	34,328,000	0	34,328,000	95.36	1,672,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	130,000,000	36,000,000	34,328,000	0	34,328,000	95.36	1,672,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	934,908,000	892,439,000	888,482,455	0	888,482,455	99.56	3,956,545
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,000,000	104,000,000	102,580,990	0	102,580,990	98.64	1,419,010
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	984,908,000	996,439,000	991,063,445	0	991,063,445	99.46	5,375,555
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,381,039,000	2,112,531,000	2,065,578,572	86	2,065,578,486	97.78	46,952,514

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	439,046,000	264,297,000	251,869,000	0	251,869,000	95.3	12,428,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	28,512,000	8,748,000	0	0	0	0	8,748,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	700,000	609,950	0	609,950	87.14	90,050
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71,280,000	72,540,000	72,540,000	0	72,540,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,516,000	131,518,000	111,082,981	0	111,082,981	84.46	20,435,019
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	577,354,000	477,803,000	436,101,931	0	436,101,931	91.27	41,701,069
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	22,823,000	10,196,000	9,880,410	0	9,880,410	96.9	315,590
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,983,000	10,196,000	9,880,410	0	9,880,410	96.9	315,590
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,000,000	71,000,000	43,610,000	0	43,610,000	61.42	27,390,000
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	21,937,000	23,770,000	22,594,190	0	22,594,190	95.05	1,175,810
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	81,937,000	94,770,000	66,204,190	0	66,204,190	69.86	28,565,810
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	180,000,000	100,800,000	90,721,945	0	90,721,945	90	10,078,055
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	1,200,000	1,093,509	0	1,093,509	91.13	106,491
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	10,800,000	6,951,400	0	6,951,400	64.36	3,848,600
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,000,000	1,000,000	950,000	0	950,000	95	50,000
522141	Belanja Sewa	35,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	0	0	0	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	171,739,000	200,051,000	193,883,870	0	193,883,870	96.92	6,167,130
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	428,739,000	318,851,000	298,600,724	0	298,600,724	93.65	20,250,276
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154,196,000	364,216,000	317,346,000	0	317,346,000	87.13	46,870,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271,867,000	236,013,000	202,049,402	0	202,049,402	85.61	33,963,598
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	426,063,000	600,229,000	519,395,402	0	519,395,402	86.53	80,833,598
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,626,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32,721,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	62,347,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,607,423,000	1,504,849,000	1,333,182,657	0	1,333,182,657	88.59	171,666,343

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3987.EBA	3,988,462,000	3,617,380,000	3,398,761,229	86	3,398,761,143	93.956	218,618,857
EBD 52 5212 521211	Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	11,132,000	700,000	685,000	0	685,000	97.86	15,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	11,132,000	700,000	685,000	0	685,000	97.86	15,000
5241 524111 524119	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,600,000 36,330,000	0 12,070,000	0 10,402,200	0 0	0 10,402,200	0 86.18	0 1,667,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	43,930,000	12,070,000	10,402,200	0	10,402,200	86.18	1,667,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	55,062,000	12,770,000	11,087,200	0	11,087,200	86.82	1,682,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3987.EBD	55,062,000	12,770,000	11,087,200	0	11,087,200	86.822	1,682,800
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN3987	4,043,524,000	3,630,150,000	3,409,848,429	86	3,409,848,343	93.93	220,301,657
3989 PDC 52 5241 524111	Pengendalian Mutu Sertifikasi Produk BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	13,800,000	12,000,000	0	12,000,000	86.96	1,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	20,000,000	13,800,000	12,000,000	0	12,000,000	86.96	1,800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,000,000	13,800,000	12,000,000	0	12,000,000	86.96	1,800,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.PDC	20,000,000	13,800,000	12,000,000	0	12,000,000	86.957	1,800,000
PDF 52 5241 524111 524119	Sertifikasi Lembaga BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0 15,000,000	15,760,000 0	15,561,505 0	0 0	15,561,505 0	98.74 0	198,495 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,000,000	15,760,000	15,561,505	0	15,561,505	98.74	198,495
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,000,000	15,760,000	15,561,505	0	15,561,505	98.74	198,495
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.PDF	15,000,000	15,760,000	15,561,505	0	15,561,505	98.741	198,495
QIA 52 5212	Pengawasan dan Pengendalian Produk BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	0	900,000	899,900	0	899,900	99.99	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	900,000	899,900	0	899,900	99.99	100
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	4,500,000	4,499,900	0	4,499,900	100	100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.QIA	0	4,500,000	4,499,900	0	4,499,900	99.998	100
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.QIC	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN3989	35,000,000	35,860,000	32,061,405	0	32,061,405	89.41	3,798,595
7010	Manajemen Mutu							
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	500,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,500,000	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,500,000	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	5,500,000	2,368,650	0	2,368,650	43.07	3,131,350
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	9,440,000	27,300,000	24,458,262	0	24,458,262	89.59	2,841,738
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9,440,000	32,800,000	26,826,912	0	26,826,912	81.79	5,973,088
5221	Belanja Jasa							
522191	Belanja Jasa Lainnya	41,000,000	42,640,000	42,039,500	0	42,039,500	98.59	600,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	41,000,000	42,640,000	42,039,500	0	42,039,500	98.59	600,500
5231	Belanja Pemeliharaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	5,000,000	3,400,000	0	3,400,000	68	1,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	5,000,000	3,400,000	0	3,400,000	68	1,600,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,560,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,560,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	85,000,000	100,940,000	92,766,412	0	92,766,412	91.9	8,173,588
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7010.PBR	85,000,000	100,940,000	92,766,412	0	92,766,412	91.903	8,173,588
PDD	Standarisasi Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,500,000	9,500,000	8,500,000	0	8,500,000	89.47	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,500,000	9,500,000	8,500,000	0	8,500,000	89.47	1,000,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	9,500,000	8,640,000	8,590,290	0	8,590,290	99.42	49,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9,500,000	8,640,000	8,590,290	0	8,590,290	99.42	49,710
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	11,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	30,000,000	18,140,000	17,090,290	0	17,090,290	94.21	1,049,710
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7010.PDD	30,000,000	18,140,000	17,090,290	0	17,090,290	94.213	1,049,710
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN7010	115,000,000	119,080,000	109,856,702	0	109,856,702	92.25	9,223,298
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	4,193,524,000	3,785,090,000	3,551,766,536	86	3,551,766,450	93.84	233,323,550
04	PNBP							
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan,							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,108,000	18,108,000	0	0	0	0	18,108,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,708,000	21,708,000	0	0	0	0	21,708,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	21,708,000	21,708,000	0	0	0	0	21,708,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3987.EBD	21,708,000	21,708,000	0	0	0	0	21,708,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN3987	21,708,000	21,708,000	0	0	0	0	21,708,000
3989 BIA 52 5212 521211	Pengendalian Mutu Pengawasan dan Pengendalian Produk BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.BIA	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
PDC 52 5212 521211	Sertifikasi Produk BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,200,000	27,400,000	0	0	0	0	27,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,200,000	27,400,000	0	0	0	0	27,400,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	25,000,000	31,200,000	0	0	0	0	31,200,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.PDC	25,000,000	31,200,000	0	0	0	0	31,200,000
PDF 52 5212 521211	Sertifikasi Lembaga BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	11,100,000	11,100,000	0	0	0	0	11,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	11,100,000	11,100,000	0	0	0	0	11,100,000
5241 524111 524113 524119	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49,780,000 9,120,000 0	34,020,000 9,120,000 15,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34,020,000 9,120,000 15,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	58,900,000	58,140,000	0	0	0	0	58,140,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	70,000,000	69,240,000	0	0	0	0	69,240,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.PDF	70,000,000	69,240,000	0	0	0	0	69,240,000
QIA 52 5212 521211	Pengawasan dan Pengendalian Produk BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	4,320,000	3,420,000	0	0	0	0	3,420,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,320,000	3,420,000	0	0	0	0	3,420,000
5218 521811 521821	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan bahan baku	3,600,000 0	0 3,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,080,000	13,480,000	0	0	0	0	13,480,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,080,000	13,480,000	0	0	0	0	13,480,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	25,000,000	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.QIA	25,000,000	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000
QIC 52 5241 524111	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,000,000	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	10,000,000	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,000,000	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3989.QIC	10,000,000	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN3989	135,000,000	134,140,000	0	0	0	0	134,140,000
7010 ABR 52 5241 524111	Manajemen Mutu Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7010.ABR	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 13 **BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 032130800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 567432 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
DCC 52 5241 524119	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							
		8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7010.DCC	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
PDD 52 5212 521211 521219	Standarisasi Lembaga BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya							
		0	11,900,000	11,681,700	0	11,681,700	98.17	218,300
		25,000,000	11,100,000	11,100,000	0	11,100,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	25,000,000	23,000,000	22,781,700	0	22,781,700	99.05	218,300
5218 521821	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan bahan baku							
		0	860,000	721,500	0	721,500	83.9	138,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	860,000	721,500	0	721,500	83.9	138,500
5221 522151	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi							
		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	25,000,000	25,860,000	25,503,200	0	25,503,200	98.62	356,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7010.PDD	25,000,000	25,860,000	25,503,200	0	25,503,200	98.62	356,800
QIA 52 5241 524111	Pengawasan dan Pengendalian Produk BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa							
		8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7010.QIA	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN7010	46,000,000	46,860,000	25,503,200	0	25,503,200	54.42	21,356,800
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	202,708,000	202,708,000	25,503,200	0	25,503,200	12.58	177,204,800
	JUMLAH BELANJA	4,396,232,000	3,987,798,000	3,577,269,736	86	3,577,269,650	89.71	410,528,350

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 567432
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUMATERA BARAT
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/06/26 4:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/5/26 7:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	815,000,000	661,000,000	660,487,300	0	660,487,300	99.92	512,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	17,000	9,119	86	9,033	53.14	7,967
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	73,925,000	56,092,000	50,104,480	0	50,104,480	89.33	5,987,520
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,600,000	18,600,000	16,016,734	0	16,016,734	86.11	2,583,266
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11,340,000	6,733,000	6,120,000	0	6,120,000	90.9	613,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	84,250,000	27,390,000	26,460,000	0	26,460,000	96.6	930,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,482,000	4,717,000	3,715,622	0	3,715,622	78.77	1,001,378
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,500,000	40,000,000	37,296,300	0	37,296,300	93.24	2,703,700
511129	Belanja Uang Makan PNS	130,000,000	107,000,000	99,328,000	0	99,328,000	92.83	7,672,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,740,000	18,740,000	18,295,000	0	18,295,000	97.63	445,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,215,854,000	940,289,000	917,832,555	86	917,832,469	97.61	22,456,531
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	34,350,000	95,000,000	82,890,200	0	82,890,200	87.25	12,109,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	3,000	1,408	0	1,408	46.93	1,592
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,716,000	7,800,000	7,327,940	0	7,327,940	93.95	472,060
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,000,000	3,300,000	1,387,424	0	1,387,424	42.04	1,912,576
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,900,000	4,100,000	3,360,000	0	3,360,000	81.95	740,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,310,000	6,200,000	5,793,600	0	5,793,600	93.45	406,400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,000,000	20,400,000	18,864,000	0	18,864,000	92.47	1,536,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	3,000,000	2,730,000	0	2,730,000	91	270,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	50,277,000	139,803,000	122,354,572	0	122,354,572	87.52	17,448,428
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	130,000,000	36,000,000	34,328,000	0	34,328,000	95.36	1,672,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	130,000,000	36,000,000	34,328,000	0	34,328,000	95.36	1,672,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	934,908,000	892,439,000	888,482,455	0	888,482,455	99.56	3,956,545
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,000,000	104,000,000	102,580,990	0	102,580,990	98.64	1,419,010
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	984,908,000	996,439,000	991,063,445	0	991,063,445	99.46	5,375,555
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,381,039,000	2,112,531,000	2,065,578,572	86	2,065,578,486	97.78	46,952,514
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	439,046,000	264,297,000	251,869,000	0	251,869,000	95.3	12,428,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 567432
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUMATERA BARAT
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/06/26 4:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/5/26 7:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	28,512,000	8,748,000	0	0	0	0	8,748,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	700,000	609,950	0	609,950	87.14	90,050
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71,280,000	72,540,000	72,540,000	0	72,540,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	33,016,000	131,518,000	111,082,981	0	111,082,981	84.46	20,435,019
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	577,854,000	477,803,000	436,101,931	0	436,101,931	91.27	41,701,069
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	54,375,000	43,216,000	23,147,010	0	23,147,010	53.56	20,068,990
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0	0	0	0		0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	55,000,000	41,100,000	40,100,000	0	40,100,000	97.57	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	117,535,000	84,316,000	63,247,010	0	63,247,010	75.01	21,068,990
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,600,000	76,500,000	45,978,650	0	45,978,650	60.1	30,521,350
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	40,877,000	64,170,000	56,364,242	0	56,364,242	87.84	7,805,758
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	104,477,000	140,670,000	102,342,892	0	102,342,892	72.75	38,327,108
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	180,000,000	100,800,000	90,721,945	0	90,721,945	90	10,078,055
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	1,200,000	1,093,509	0	1,093,509	91.13	106,491
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	10,800,000	6,951,400	0	6,951,400	64.36	3,848,600
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,000,000	1,000,000	950,000	0	950,000	95	50,000
522141	Belanja Sewa	35,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	212,739,000	242,691,000	235,923,370	0	235,923,370	97.21	6,767,630
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	469,739,000	363,491,000	342,640,224	0	342,640,224	94.26	20,850,776
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154,196,000	364,216,000	317,346,000	0	317,346,000	87.13	46,870,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271,867,000	241,013,000	205,449,402	0	205,449,402	85.24	35,563,598
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	426,063,000	605,229,000	522,795,402	0	522,795,402	86.38	82,433,598
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199,746,000	140,960,000	34,161,505	0	34,161,505	24.23	106,798,495
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,120,000	9,120,000	0	0	0	0	9,120,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	110,659,000	53,678,000	10,402,200	0	10,402,200	19.38	43,275,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	319,525,000	203,758,000	44,563,705	0	44,563,705	21.87	159,194,295
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,015,193,000	1,875,267,000	1,511,691,164	0	1,511,691,164	80.61	363,575,836
	JUMLAH BELANJA	4,396,232,000	3,987,798,000	3,577,269,736	86	3,577,269,650	89.71	410,528,350

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 567432

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUMATERA BARAT
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 26/06/26 4:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	51,000,000	2,990,000	0	2,990,000	5.86
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	51,000,000	2,990,000	0	2,990,000	5.86
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	51,000,000	2,990,000	0	2,990,000	5.86
	JUMLAH PENDAPATAN	51,000,000	2,990,000	0	2,990,000	5.86

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal : 26/06/26 4:05 PM

SATUAN KERJA : 567432

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfp_g_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
3989	Pengendalian Mutu	166,200,000	166,200,000	32,061,405	0	32,061,405	19.29	134,138,595
7010	Manajemen Mutu	152,500,000	157,440,000	135,359,902	0	135,359,902	85.98	22,080,098
	JUMLAH PROGRAM Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	318,700,000	323,640,000	167,421,307	0	167,421,307	51.73	156,218,693
WA	Program Dukungan Manajemen							
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,065,232,000	3,651,858,000	3,409,848,429	86	3,409,848,343	93.37	242,009,657
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,065,232,000	3,651,858,000	3,409,848,429	86	3,409,848,343	93.37	242,009,657
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	8,130,464,000	7,303,716,000	6,819,696,858	172	6,819,696,686	93.37	484,019,314
	JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	8,449,164,000	7,627,356,000	6,987,118,165	172	6,987,117,993	91.61	640,238,007
	JUMLAH FUNGSI EKONOMI	8,449,164,000	7,627,356,000	6,987,118,165	172	6,987,117,993	91.61	640,238,007

Disusun Oleh:
Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Padang